



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3A
Tahun 2020**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban atas beberapa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Tahun 2020 adalah tahun ke 4 di dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai Perda no 27 tahun 2010 yang mana di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada misi 7 yaitu :

- Sedangkan pada misi ke 7 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **‘Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak’** dengan sasaran : **“Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak “** Yang mana dari misi ini tertuang dalam renstra Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Persentase ARG dalam APBD

- Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Persentase ARG dalam APBD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 16,99% tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar 15,90 % terdiri 39 badan, dinas dan Sekretariat serta 18 kecamatan dengan dilihat dari :
 - a) Berdasarkan Akses
 - b) Berdasarkan Partisipasi
 - c) Berdasarkan Kontrol
 - d) Berdasarkan segi Manfaat dari program masing-masing OPD
- Pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2020 untuk Persentase ARG dalam APBD ditargetkan sebesar 16,99% atau Rp. 575.961.000.000 dari total Belanja Langsung APBD Tahun 2020 yang sebesar Rp.3.390.734.116.112,05 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Nomor 05 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar 15,90% atau Rp. 539.010.000.000 terdapat kenaikan realisasi 0,06% atau Rp. 61.499.034.042 dibandingkan pada tahun lalu dimana tahun 2019 ini terealisasi sebesar 15,84%.
- Dilihat dari Tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung meurun untuk tahun 2019 tercapai 104,83 point sedangkan Tahun 2020 tercapai 93,58 point ada selisih 11,25 point terjadi penurunan dibandingkan dari tahun 2019.

b. Kabupaten Layak Anak (KLA)

- Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tahun 2020 ditargetkan pada point 710 tetapi sampai dengan akhir tahun untuk indikator ini sudah terealisasi pada angka 7100 (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73,60 point, klaster II dengan 125,50 poin, klaster III dengan 115,30 poin, klaster IV dengan 84,70 poin, klaster V

dengan 98,75 poin dan Kelanana dengan 65.25 poin yang dipengaruhi oleh beberapa Klaster sebagai berikut :

- a) Hak Sipil dan Kebebasan / Klaster I
- b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif / Klaster II
- c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan / Klaster III
- d) Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya / klaster IV
- e) Perlindungan Khusus / Klaster V

- Pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2020 untuk Kabupaten Layak Anak (KLA) ditargetkan sebesar nilai 710 dengan terealisasi 710 yang terdiri dari (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73.60 point, klaster II dengan 125.50 poin, klaster III dengan 115.30 poin, klaster IV dengan 84,70 poin, klaster V dengan 98,75 poin dan Kelanana dengan 65.25 poin), terdapat kenaikan realisasi 100 poin dibandingkan pada tahun lalu dimana tahun 2019 ini terealisasi sebesar 610 (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73.50 point, klaster II dengan 115.50 poin, klaster III dengan 115.30 poin, klaster IV dengan 83,70 poin, klaster V dengan 60.25 poin dan Kelanana dengan 60.25 poin).
- Dilihat dari tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari dari pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat untuk tahun 2019 tercapai 610 point sedangkan tahun 2020 tercapai 710 point, terdapat selisih 100 point dimana terjadi peningkatan dibandingkan dari tahun 2020.

C. Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Utama Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 110 Kasus tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar yang terdiri dari 131 kasus kekerasan anak 90 kasus dan kekerasan orang dewasa atau perempuan 41 kasus, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai tingkat putusan.
- Pada tahun 2020 dari target 100% (110 kasus) untuk indikator ini terealisasi sebesar 96,95% atau 131 kasus yang ditangani baik mediasi dikepolisian maupun sudah ada putusan kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai tingkat putusan.
- Dilihat dari tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari Akhir RPJMD tahun 2019 tercapai 98.35% ada 121 kasus yang ditangani, sedangkan untuk tahun 2020 untuk indikator ini terjadi peningkatan dari kasus yang ditangani yaitu 96,95% dari 131 kasus yang ditangani dengan 31,30% (41 Kasus) kekerasan orang dewasa atau perempuan dan 65,65% dengan 90 kasus kekerasan anak serta 3,05% atau 4 kasus masih belum ada putusan dari pengadilan.

A. Dari ke ketiga indikator diatas ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019 ini diantaranya :

- Belum Optimal OPD terkait dalam menganalisis Anggaran yang Responsif Gender, serta tentang Kabupaten Layak Anak
- Kurangnya tenaga ahli yang telah terlatih (bersertifikat), sebagai Narasumber untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak.
- Minimnya dana yang tersedia, sehingga masih ada beberapa kecamatan dan desa yang belum diberikan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak.
- Perlu dibentuk satgas di masing-masing kecamatan dalam hal penanganan kekerasan anak dan perempuan
- Masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Tidak tersedianya tempat Rehabilitasi Sosial Anak Korban Narkoba
- Tidak tersedianya ruangan khusus pemeriksaan korban dirumah sakit
- Sumber Daya Manusia : Masih adanya pemahaman bahwa Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah tanggung jawab sektoral dan belum menjadi perspektif bagi satuan kerja yang lain, Dan masih banyak SDM aparatur yang belum memahami penggunaan alat analisis gender dalam memecahkan isu dan permasalahan Pembangunan Gender.
- Kebijakan : Komitmen Pemangku kebijakan masih kurang, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dianggap bukan tugas utama Perangkat Daerah (PD).
- Belum semua OPD memiliki data pilah gender sebagai landasan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- Rendahnya angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
- Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara Maksimal
- Kurangnya Perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat pembinaan

d. Realisasi Keuangan

Pada Tahun 2020 Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 5.494.776.456.337,06 dimana dana tersebut di alokasi untuk menunjang Belanja serta Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. **10.661.668.348,10** di lihat dari prosentase dana yang dialokasikan adalah sebesar 0,19% dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Belanja OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kutai Kartanegara pada periode Tahun 2020 sebesar Rp. **9.952.220.643,00** atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp. **10.661.668.348,10** terdapat penurunan realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang sebesar Rp. **10.802.035.161,8** atau **93,73%**.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan anugrahnya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pelaporan ini merupakan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan informasi tanggung jawab kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

Tenggarong, 28 Februari 2021
Kepala,

Hj. Aji Lina Rodiah, SE
Pembina Utama Muda I (IV/C)
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

Eksekutif Sumery	1
Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Bab. I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Aspek Strategis Dinas PP dan PA	7
C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PP dan PA	8
D. Struktur Organisasi Dinas PP dan PA	8
E. Sumber Daya manusia Dinas PP dan PA	10
Bab. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Visi SKPD	12
C. Misi SKPD	12
D. Tujuan SKPD	13
E. Perjanjian Kinerja tahun 2019	14
Bab. III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Indikator Kinerja	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
a. Persentase ARG dalam APBD	17
b. Kabupaten Layak Anak (KLA)	23
c. Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	26
C. Realisasi Keuangan	38
Bab. IV Penutup	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sesuai peraturan yang ada, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran. Pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihitisan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dilakukan dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian kerja juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata sebagai komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam penjelesan permen tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terhadap kepala daerah, sehingga dapat di ketahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan atau ketidak berhasilan yang di alami. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 sebagai wahana pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2020. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, lengkap dan terukur mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran yang di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

B. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdapat pada misi ke 7 pada RPJMD yaitu

- **Misi ke 7** yaitu : meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. TUGAS :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

III. FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

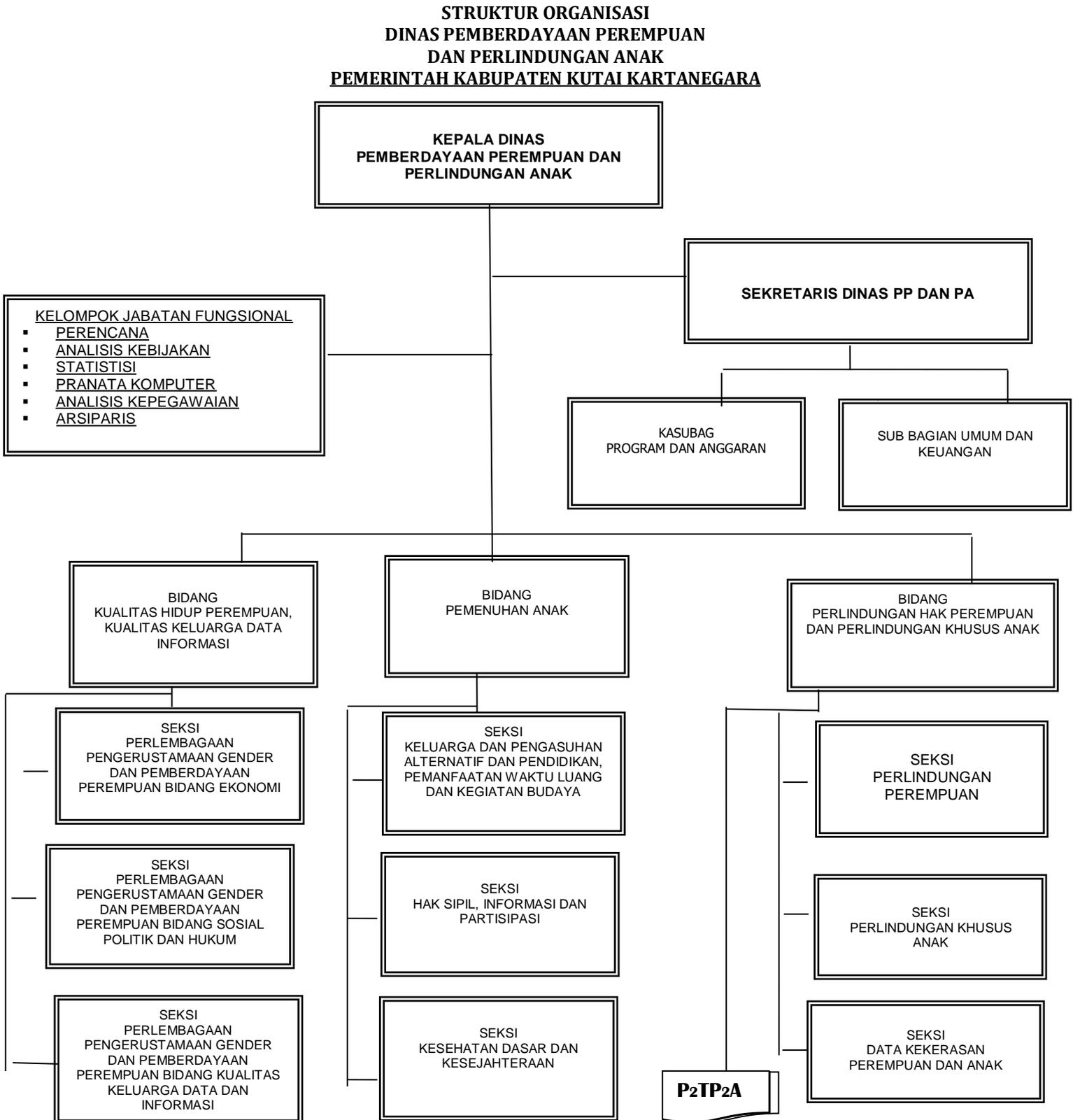
- Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 yang terdiri dari :

- Kepala Dinas ;
- Sekretariat , membawahkan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahkan:
 - Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
- Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan;
 - Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
 - Seksi Perlindungan Perempuan;
 - Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016



E.Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 sebanyak 53 orang, dengan perincian :

PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	1	7	8
III	9	20	29
II	9	7	16
Total	19	34	53

2. DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	3	7	10
S1	7	19	26
D3	-	-	-
SLTA	9	8	17
Total	19	34	53

3. DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING

Esselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II	0	1	1
III	0	3	3
IV	2	8	10
STAF	17	22	39
Total	19	34	53

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan renstra terdapat tiga (3) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada renstra DP3A yang dapat dilihat dibawah ini

SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD
	Kabupaten Layak Anak (KLA)
	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat akuntabilitas DP3A

Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan Renstra OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. Visi SKPD

Berdasarkan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra OPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, maka ditetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara: **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan “**

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang memperjuangkan kepentingan keluarga sebagai bagian terkecil dari sebuah negara, perempuan yang selama ini termarginalkan, dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. MISI

Dalam upaya mencapai visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan misi selama kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

- a) Mendorong Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi
- b) Menyelenggarakan Pemenuhan Hak Anak meliputi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, dan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- c) Mendoong rencana kegiatan urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak meliputi Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- d) Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui pendayagunaan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga dan masyarakat;

- e) Mendorong optimalnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; meningkatkan peran, posisi, dan komposisi perempuan di lembaga eksekutif (jabatan struktural)
- f) Menyelenggarakan perlindungan anak melalui penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak,

D. TUJUAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan, perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk TPPO terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak dengan sasaran menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan Anak
2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kelembagaan PUG dalam pembangunan
 - b. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
 - c. Meningkatnya keberdayaan ekonomi perempuan
 - d. Meningkatnya kualitas keluarga
 - e. Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dengan sasaran yang meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
4. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan publik yang prima

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuangkan di dalam :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	18.56	12.43	15.11	16.99	17.4
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	510	510	610	710	810
		Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	175	160	130	110	90
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat akuntabilitas DP3A	76	76	76	77	78

E.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan komitmen pernyataan tekad dan janji dalam kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dalam hal ini menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 dimana pada penyusunan awal perjanjian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Pengutan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	16.99
		Kabupaten Layak Anak (KLA)	710
		Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	110
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat akuntabilitas DP3A	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 971.923.914,48	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 176.500.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 100.000.000,00	APBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 266.804.000,00	APBD
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 1.160.597.000,00	APBD
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 1.200.000.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 150.000.000,00	APBD
8	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Rp 391.940.120,00	APBD
9	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	Rp 1.260.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 5.677.765.034,48	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis indikator utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dilakukan dengan cara memuat sasaran strategis RPJMD dan renstra SKPD, indikator kinerja, satuan target, realisasi dan % capaian tahun ini dengan menampilkan target dan anggaran tahun depan :

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Realisasi Kinerja
		Target	Realisasi	
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak			
1	Persentase ARG dalam APBD	16,99	15,90	93,58
2	Kabupaten Layak Anak (KLA)	710	710	100
3	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	110	114	96,95
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan			
4	Predikat akuntabilitas OPD DP3A	77	76,11	98,84

B. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019 dari Dinas PP dan PA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

SASARAN I

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak

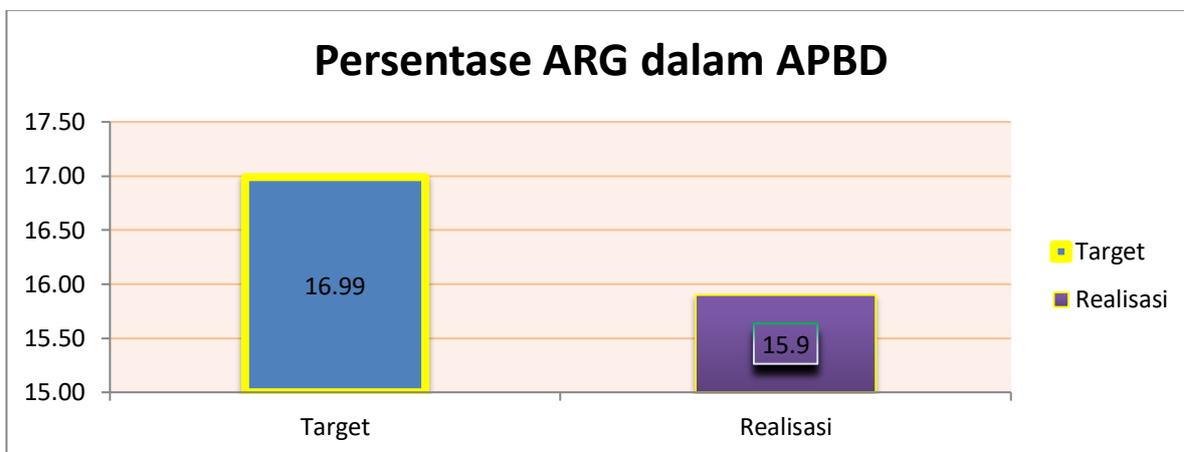
No	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
1.	Persentase ARG dalam APBD	%	16,99	15,90
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Point	710	710
3.	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	110	139

SASARAN II

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
1	Predikat akuntabilitas OPD DP3A	Nilai	77	76,11

A. Persentase ARG dalam APBD



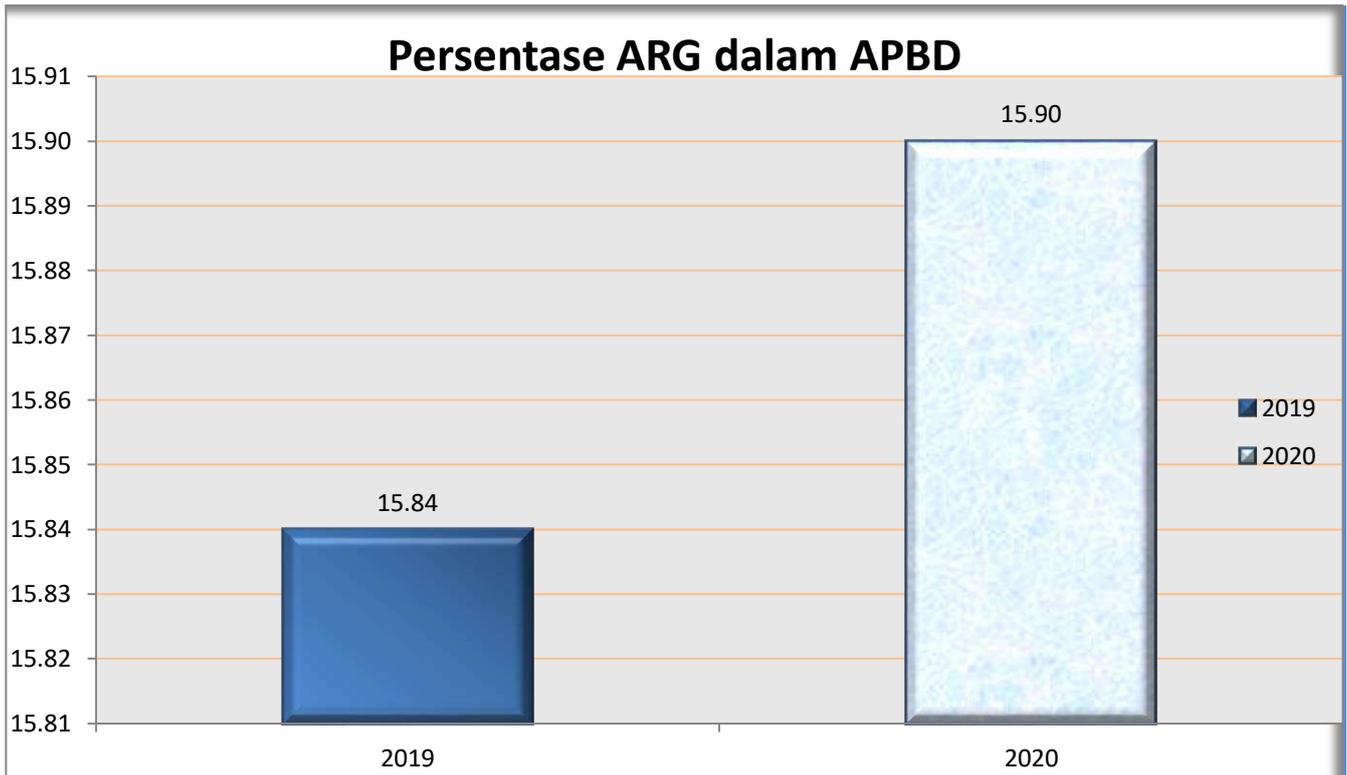
Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Persentase ARG dalam APBD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 16,99% tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar 15,90 % terdiri 39 badan, dinas dan Sekretariat serta 18 kecamatan dengan dilihat dari :

- e) Berdasarkan Akses
- f) Berdasarkan Partisipasi
- g) Berdasarkan Kontrol
- h) Berdasarkan segi Manfaat dari program masing-masing OPD

➤ Sampai Dengan Tahun 2020

❖ *Realisasi Sampai dengan tahun 2020 untuk indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD*

Sampai Dengan 2020							
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak							
No	Indikator Kinetja	Sat	Target		Realisasi		Capaian Kinerja
			2019	2020	2019	2020	
1	Persentase ARG dalam APBD	point	15.11	16,99	15.11	15.90	93,58



❖ *Capaian Realisasi Sampai dengan Tahun 2019*

Indikator	2019	2020
Persentase ARG dalam APBD	104,83	93,58



Daftar OPD yang Anggaran yang Sudah Responsif Gender

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN UNTUK RESPONSIF GENDER (ARG)
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.287.048.886
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	218.050.237.368
		Program Pendidikan Non Formal	7.208.706.888
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.384.948.889
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.284.948.890
3	DINAS KESEHATAN	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.154.138.891
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4.189.805.117
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.841.033.893
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	779.948.894
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	5.548.328.895
		Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	1.722.579.762
		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	8.626.948.897
		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	779.948.898
4	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	796.723.299
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	779.948.900
5	RSUD DAYAKU RAJA	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.029.948.901
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	71.583.018.602
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	808.948.903
		Program Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1.109.736.704
8	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	769.103.905
		Program pendidikan politik masyarakat	2.470.286.706

19	DINAS SOSIAL	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1.644.948.907
		Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	2.509.948.908
		Program Penanganan Fakir Miskin	1.924.810.634
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.153.948.910
		Program Pemberdayaan Sosial	1.497.794.911
10	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.872.238.912
		Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.650.848.113
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.402.259.014
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.801.867.015
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	723.548.916
		Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	1.448.948.917
		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	946.691.896
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	6.958.514.919
13	DINAS PEKERJAAN UMUM (Pertanahan)	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	23.379.948.920
14	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Lingkungan Hidup)	ProgramLingkungan Sehat perumahan	2.881.237.921
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2.169.948.922
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (Adminsitrasi kependudukan dan Capil)	Program penataan administrasi kependudukan	4.178.143.923
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	2.534.767.676
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1.814.948.925
		program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	989.018.926
		Program desa pemberdayaan masyarakat	1.029.948.927
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program KB	1.479.948.928
		Program pengendalian penduduk	7.359.511.929
		program advokasim pergerakan dan informasi	994.948.930
19	DINAS PERHUBUNGAN	Program peningkatan pelayanan pengangkutan	3.679.948.931
20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.881.237.932
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	Program pengembangan kewirausahaan dan	979.448.933

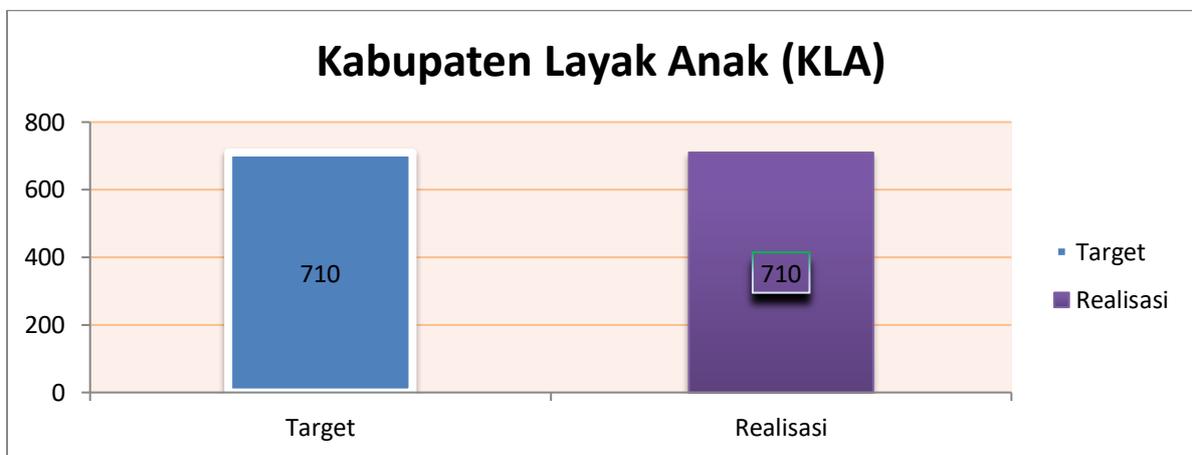
	MENENGAH (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	
		Program pengembangan sistem pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1.473.763.934
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (penanaman modal)	Program peningkatan dan kemudahan pelayanan perijinan dan non perijinan	1.322.952.123
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	5.178.777.936
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1.729.948.937
24	DINAS PARIWISATA	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	5.474.948.938
25	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (pertanian)	Program peningkatan kesejahteraan petani	704.948.939
		program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	6.127.898.940
26	DINAS PERKEBUNAN	Program peningkatan kesejahteraan perkebunan	2.664.550.765
27	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Energi dan Sumberdaya Mineral)	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.194.970.142
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (perdagangan)	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.154.948.943
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	779.948.944
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	2.474.948.945
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	2.126.585.946
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	729.948.947
29	SEKRETARIAT DAERAH (Administrasi Pemerintahan)	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	829.948.948
		Program peningkatan pelayanan publik	1.027.348.107
30	INSPEKTORAT KABUPATEN	Program peningkatan aparaturnya pengawasan profesionalisme tenaga pemeriksa aparaturnya pengawasan	1.229.948.950
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	1.729.948.951
		Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	2.929.948.952
		Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	1.954.948.953
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(kepegawaian)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	5.551.512.074
33	KECAMATAN TENGGARONG	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	11.280.479.955
		Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum	2.488.601.836
34	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	991.948.957

		Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum	1.179.948.958
35	KECAMATAN LOA KULU	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1.259.980.959
		Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum	1.039.948.960
36	KECAMATAN LOA JANAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1.022.290.961
		Program pembangunan / Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum	719.948.962
37	KECAMATAN MUARA BADAK	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	766.748.963
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	981.619.964
38	KECAMATAN MARANG KAYU	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	752.048.965
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	751.348.966
39	KECAMATAN MUARA JAWA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	5.836.728.967
40	KECAMATAN SAMBOJA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	10.564.554.968
41	KECAMATAN SEBULU	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	951.337.369
42	KECAMATAN MUARA KAMAN	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	649.948.970
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1.043.248.971
43	KECAMATAN KOTA BANGUN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	980.277.853
44	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	982.948.973
45	KECAMATAN KENOHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	990.948.974
46	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1.062.875.975
47	KECAMATAN TABANG	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	9.640.182.576
48	KECAMATAN MUARA WIS	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	932.118.377
49	KECAMATAN SANGA-SANGA	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	654.948.978
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	3.876.368.979
50	KECAMATAN ANGGANA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	1.033.520.980
TOTAL			538.923.394.443

Dari table diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2020 untuk Persentase ARG dalam APBD ditargetkan sebesar 16,99% atau Rp. 575.961.000.000 dari total Belanja Lansung APBD Tahun 2020 yang sebesar Rp.3.390.734.116.112,05 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Nomor 05 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar 15,90% atau Rp. 539.010.000.000 terdapat kenaikan realisasi 0,06% atau Rp. 61.499.034.042 dibandingkan pada tahun lalu dimana tahun 2019 ini terealisasi sebesar 15,84%.
- Dilihat dari Tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung meurun untuk tahun 2019 tercapai 104,83 point sedangkan Tahun 2020 tercapai 93,58 point ada selisih 11,25 point terjadi penurunan dibandingkan dari tahun 2019.

B. Kabupaten Layak Anak (KLA)



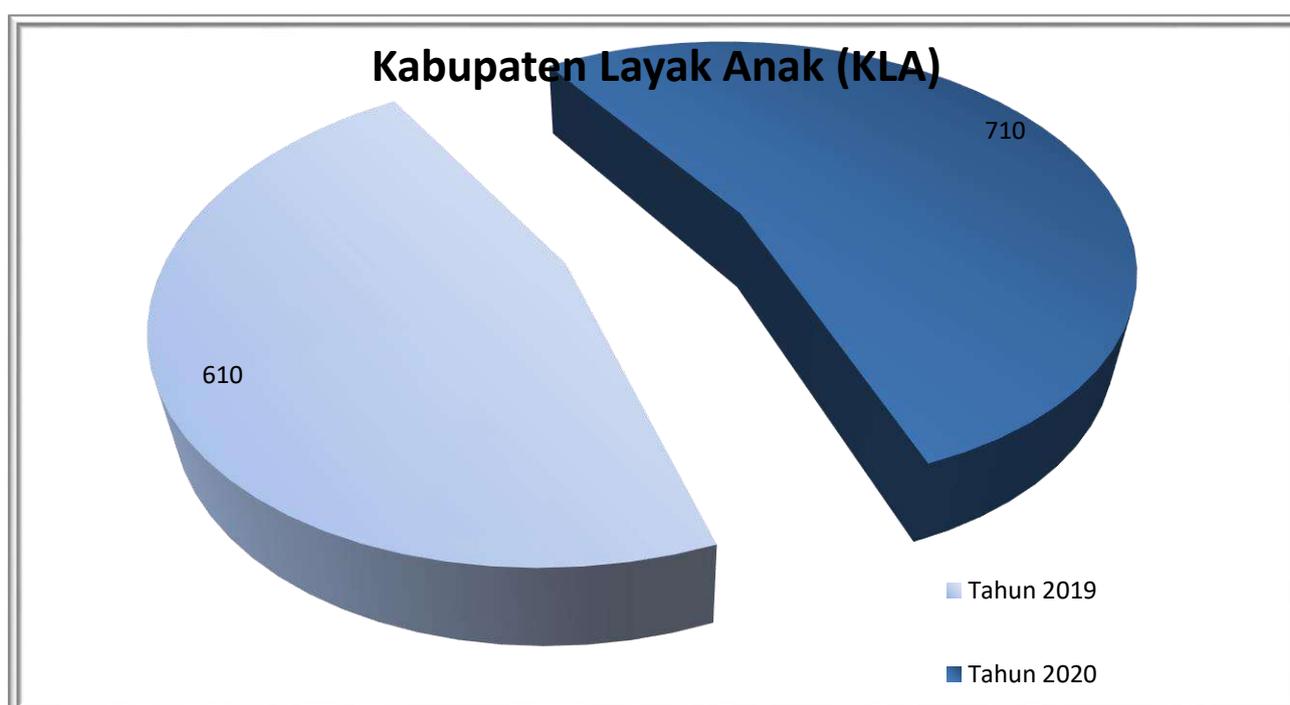
Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tahun 2020 ditargetkan pada point 710 tetapi sampai dengan akhir tahun untuk indikator ini sudah terealisasi pada angka 7100 (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73,60 point, klaster II dengan 125,50 poin, klaster III dengan 115,30 poin, klaster IV dengan 84,70 poin, klaster V dengan 98,75 poin dan Kelanana dengan 65,25 poin yang dipengaruhi oleh beberapa Klaster sebagai berikut :

- Hak Sipil dan Kebebasan / Klaster I
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif / Klaster II
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan / Klaster III
- Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya / klaster IV
- Perlindungan Khusus / Klaster V

➤ **Sampai Dengan Tahun 2020**

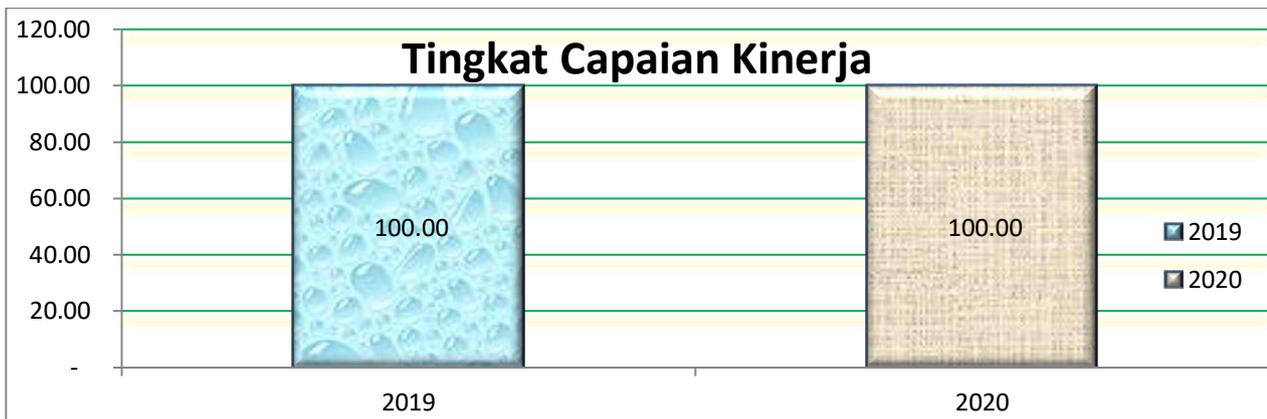
❖ *Realisasi Sampai dengan tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak (KLA)*

Sampai Dengan 2020							
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak							
No	Indikator Kinetja	Sat	Target		Realisasi		Capaian Kinerja
			2019	2020	2019	2020	
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	<i>poin</i>	610	710	610	710	100



❖ *Capaian Realisasi Sampai dengan Tahun 2020*

Indikator	2019	2020
Kabupaten Layak Anak (KLA)	100%	100%



Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2020 untuk Kabupaten Layak Anak (KLA) ditargetkan sebesar nilai 710 dengan terealisasi 710 yang terdiri dari (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73.60 point, klaster II dengan 125.50 poin, klaster III dengan 115.30 poin, klaster IV dengan 84,70 poin, klaster V dengan 98,75 poin dan Kelanana dengan 65.25 poin), terdapat kenaikan realisasi 100 poin dibandingkan pada tahun lalu dimana tahun 2019 ini terealisasi sebesar 610 (Kelembagaan 28 poin, Klaster I dengan 73.50 point, klaster II dengan 115.50 poin, klaster III dengan 115.30 poin, klaster IV dengan 83,70 poin, klaster V dengan 60.25 poin dan Kelanana dengan 60.25 poin).

EVALUASI KLA Tahun 2019

INDIKATOR	NILAI MAX	NILAI PM	NILAI VA
KELEMBAGAAN	100	95	28
KLASTER 1	125	115,50	73,50
KLASTER 2	180	156,50	115,50
KLASTER 3	150	132,30	115,30
KLASTER 4	130	107,70	83,70
KLASTER 5	215	189,25	98,75
KELANA	25	86,26	65,25
TOTAL	1000	882,50	575,01

EVALUASI KLA Tahun 2020

INDIKATOR	NILAI MAX	NILAI PM	NILAI VA
KELEMBAGAAN	100	95	29
KLASTER 1	125	115,50	73,60
KLASTER 2	180	156,50	125,50
KLASTER 3	150	132,30	115,30
KLASTER 4	130	107,70	84,70
KLASTER 5	215	189,25	98,75
KELANA	25	86,26	60,25
TOTAL	1000	895,50	675,02

- Dilihat dari tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari pada awal RPJMD 2016-2021 tepatnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat untuk tahun 2019 tercapai 610 point sedangkan tahun 2020 tercapai 710 point, terdapat selisih 100 point dimana terjadi peningkatan dibandingkan dari tahun 2020.

c. Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

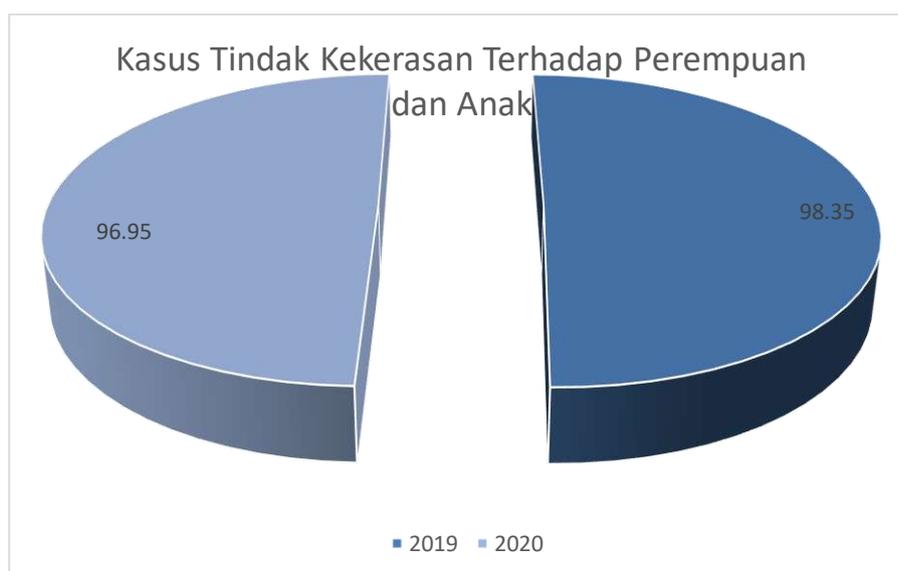


Analisis atas Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Utama Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 110 Kasus tetapi sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar yang terdiri dari 131 kasus kekerasan anak 90 kasus dan kekerasan orang dewasa atau perempuan 41 kasus, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai ketinggian putusan.

➤ **Sampai Dengan Tahun 2020**

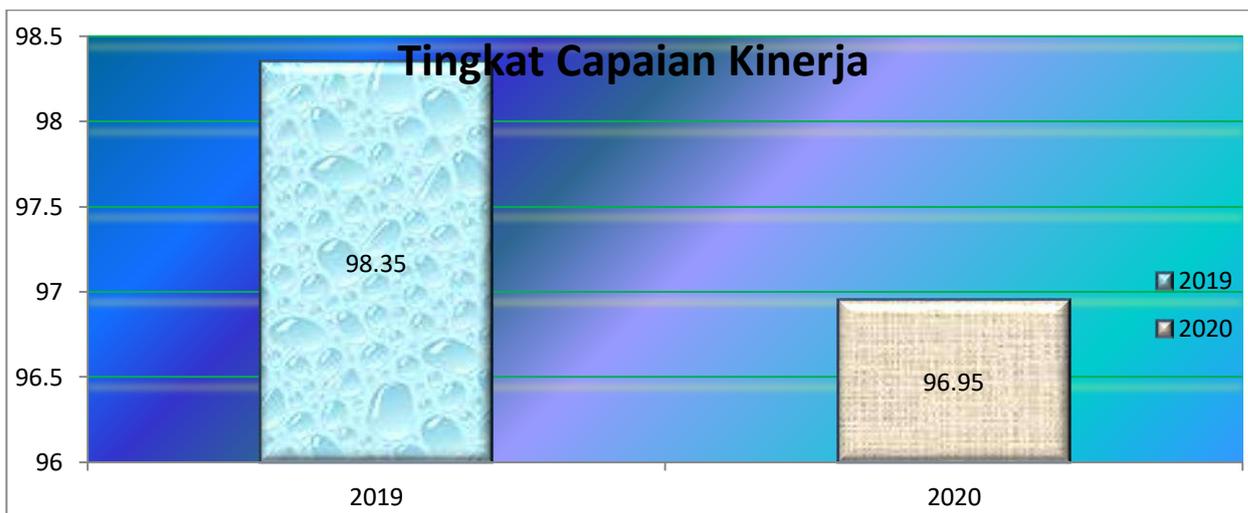
- ❖ *Realisasi Sampai dengan tahun 2020 untuk indikator kinerja Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*

Sampai Dengan 2019							
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak							
No	Indikator Kinerja	Sat	Target		Realisasi		Capaian Kinerja
			2019	2020	2019	2020	
1	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	130	110	121	131	96,95



- ❖ *Capaian realisasi sampai dengan Tahun 2020*

Indikator	2019	2020
Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	98.35	96,95

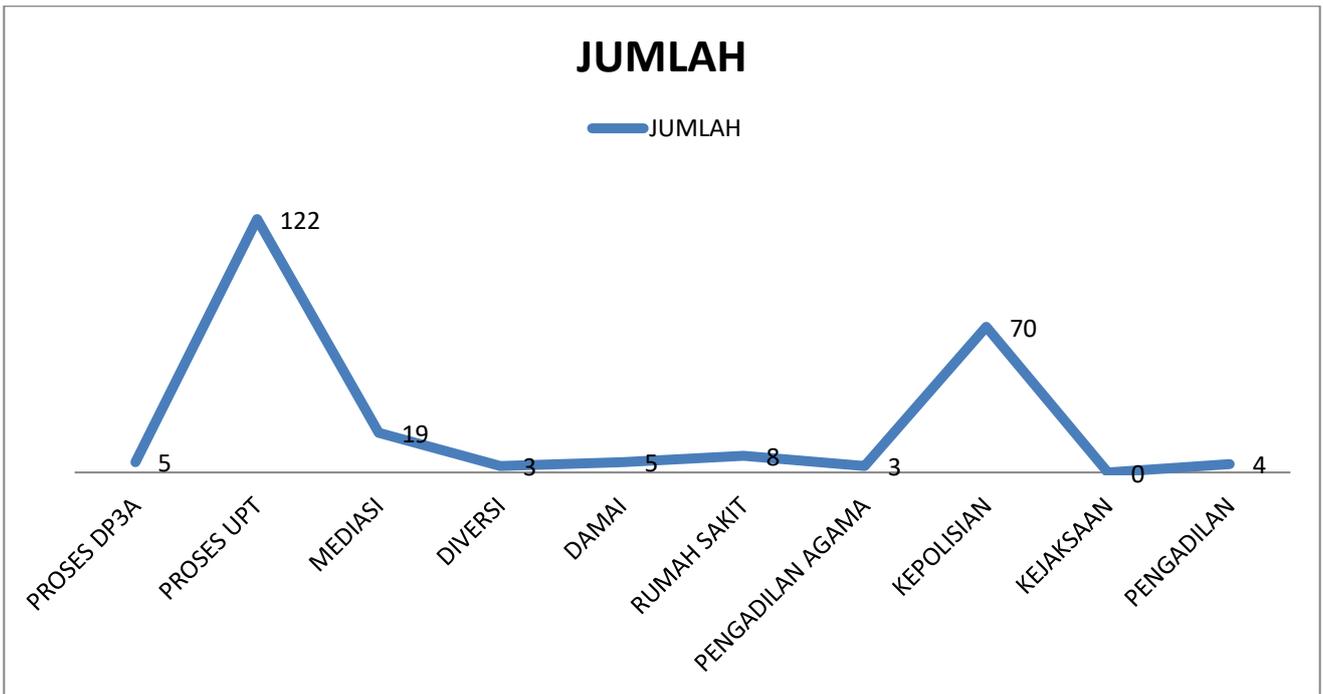


No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin		Tempat Kejadian Perkara	Penyelesaian Kasus Tahun 2020						Jumlah Kasus	
		L	P		DP3A	P2TP2A	RUMAH SAKIT	PENGADILAN AGAMA	KEPOLISIAN	KEJAKSAAN		PENGADILAN
	KEKERASAN TERHADAP ANAK											
1	KEKERASAN FISIK	0	3	KEC. MUARA MUNTAI(1), KEC.SEBULU(1)& KEC.LOA KULU(1)		PROSES UPT(3)			PROSES HUKUM(3)			3
2	KEKERASAN SEKSUAL	4	37	KEC.TENGGARONG(13), KEC. LOAKULU(3),MUARA MUNTAI (3), KEC.LOA JANAN(4),KEC.SAMBOJA(3),KEC.KEMBANG JANGGUT(3),KEC.MUARA JAWA(1),KEC.TGR SEBERANG(2),KEC.KO TABANGUN(1),KEC.SEBULU(3),KEC.MUARA KAMAN(1)KEC.SANGASANGA(1)KEC.ANGGANA(1)		PROSES UPT(40)	PELAYANAN KESEHATAN(5)		PROSES HUKUM(34)			41
3	KEKERASAN PSIKIS	5	8	KEC. TENGGARONG(10),TENGGARONG SEBERANG(1),KEC.LOA KULU(1),KEC.SEBULU(1)		PROSES UPT(13)			PROSES HUKUM(2)			13
4	PENELANTARAN	2	1	KEC. TENGGARONG(1)KEC. MUARA KAMAN(1)KEC.ANGGANA(1)		PROSES UPT(3)&MEDIASI(1)			PROSES HUKUM(1)			3
5	TRAFICKING	0	0									0
6	PENCULIKAN	0	0									0
7	ANAK BERHADAPAN HUKUM											0
	A. PERSETUBUHAN	0	0									0

	B. PENCURIAN	3	0	KEC. LOA JANAN(1)KEC.LOA KULU(1),TENGGARONG(1)		PROSES UPT(3)			PROSES HUKUM(3)			3
	C. KDRT	1	0	KEC.LOA KULU(1)		PROSES UPT(1)						1
	D. LAKALANTAS	9	2	KEC. LOA JANAN(2),TENGGARONG SEBERANG(1),KEC.SAMBOJA(3),KEC.SEBULU(1),KEC.MUARA KAMAN(1),KEC.ANGGANA(1),KEC.MUARA JAWA(2)		PROSES UPT(10)&MEDIASI(1)			PROSES HUKUM(5),MEDIASI(9)&DIVERSI(2)			11
	E. NARKOBA	5	0	KEC. LOA JANAN(1),TENGGARONG SEBERANG(1),KEC.MUARA KAMAN(1),KEC.TENGGARONG(1),KEC.TABANG(1)		PROSES UPT(5)			PROSES HUKUM(5)			5
	F. LAINNYA	2	8	KEC. MARANG KAYU(2),TENGGARONG SEBERANG(1),KEC.MUARA MUNTAI(1),KEC.TENGGARONG(3),KEC.LOA KULU(1),KEC.MUARA JAWA(1),KEC.MUARA BADA(1)		PROSES UPT(9)&MEDIASI(1)			PROSES HUKUM(4)&DIVERSI(1)			10
	JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK	31	59									90
	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN											
1	KEKERASAN FISIK	0	3	KEC. TENGGARONG(2), KEC. MUARA JAWA(1)		PROSES UPT(3)	PELAYANAN KESEHATAN(1)		PROSES HUKUM(1)			3
2	KEKERASAN SEKSUAL	0	3	KEC.TENGGARONG (2)	Proses(1) & Pendampingan (1)	PROSES UPT(1)	PELAYANAN KESEHATAN(1)		PROSES HUKUM(1)		PUTUSAN(1)	3
3	KEKERASAN PSIKIS	0	5	KEC. TENGGARONG(3), KEC.SAMBOJA(1),KEC. MUARA JAWA(1)		PROSES UPT(5)			PROSES HUKUM(4)			5
4	PENELANTARAN	0	4	KEC. MUARA MUNTAI(2),KEC. SEBULU(2)		PROSES UPT(2)MEDIASI(2)		PUTUSAN(1)	PROSES HUKUM(2)			4
5	TRAFICKING	0	0									

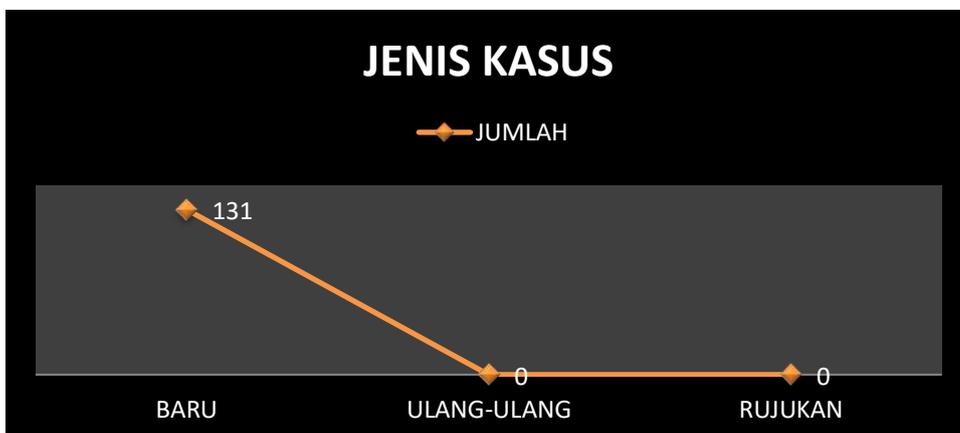
6	KDRT	0	18	KEC. LOA KULU(1), TENGGARONG SEBERANG(6), KEC. MUARA KAMAN(1), KEC. TENGGARONG(4), KEC. MUARA JAWA(1), LKEC. LOAJANAN(2), KEC. TABANG(1), KEC. KOTA BANGUN(1)	Proses(4) & Pendampingan (4)	PROSES UPT(16)& MEDIASI(1)	PELAYANAN KESEHATAN(1)	PUTUSAN(2)	PROSES HUKUM(3)	PUTUSAN(3)	18
7	LAINNYA	1	7	KEC. LOA KULU(1), TENGGARONG SEBERANG(1), KEC. MUARA MUNTAI(1), KEC. TENGGARONG(4), KEC. MUARA BADA(1), LKEC. LOAJANAN(1), KEC. KEMBARANG JANGGUT(1)		PROSES UPT(8) MEDIASI(4) & DAMAI(5)			PROSES HUKUM(2)		8
JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		1	40								41
TOTAL		32	99								131

NO.	BENTUK PENYELESAIAN KASUS	JUMLAH
1	PROSES DP3A	5
2	PROSES UPT	122
3	MEDIASI	19
4	DIVERSI	3
5	DAMAI	5
6	RUMAH SAKIT	8
7	PENGADILAN AGAMA	3
8	KEPOLISIAN	70
9	KEJAKSAAN	0
10	PENGADILAN	4
TOTAL		239



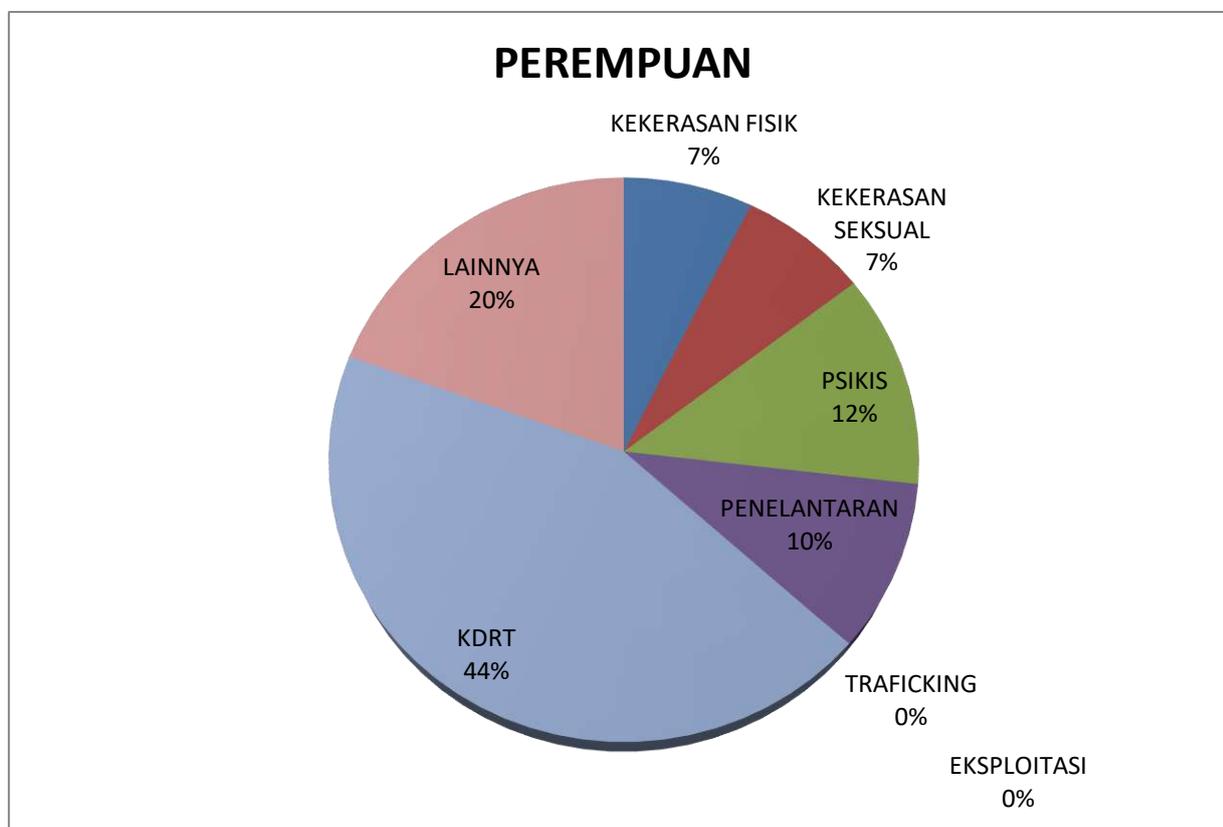
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DATA TERPILAH TAHUN 2020
BERDASARKAN JENIS KASUS**

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH
1	BARU	131
2	ULANG-ULANG	0
3	RUJUKAN	0
	TOTAL	131



**DATA TERPILAH TAHUN 2020
BERDASARKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

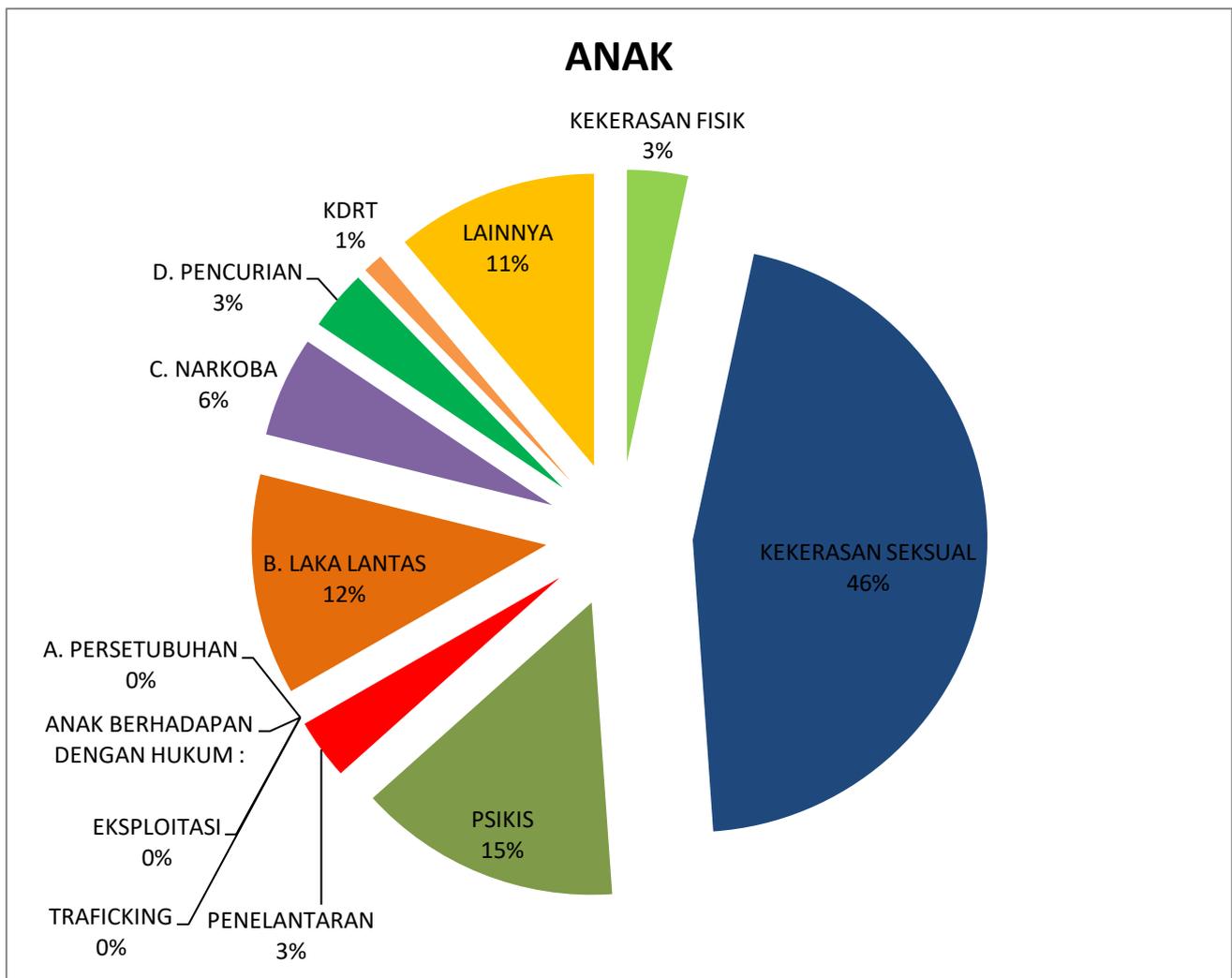
NO	BENTUK KEKERASAN	PEREMPUAN
1	KEKERASAN FISIK	3
2	KEKERASAN SEKSUAL	3
3	PSIKIS	5
4	PENELANTARAN	4
5	TRAFICKING	0
6	EKSPLOITASI	0
7	KDRT	18
8	LAINNYA	8
	JUMLAH	41



BERDASARKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	BENTUK KEKERASAN	ANAK
1	KEKERASAN FISIK	3
2	KEKERASAN SEKSUAL	41
3	PSIKIS	13
4	PENELANTARAN	3

5	TRAFICKING	0
6	EKSPLOITASI	0
7	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM :	
	A. PERSETUBUHAN	0
	B. LAKA LANTAS	11
	C. NARKOBA	5
	D. PENCURIAN	3
8	KDRT	1
9	LAINNYA	10
	JUMLAH	90



Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 dari target 100% (110 kasus) untuk indikator ini terealisasi sebesar 96,95% atau 131 kasus yang ditangani baik mediasi dikepolisian maupun sudah ada putusan kasus di Pengadilan Negeri Tenggaraong, terdapat 4 kasus atau 3,01% kasus yang ditangani dipengadilan yang sampai akhir tahun ini belum ada laporan sampai ketingkat putusan.
- Dilihat dari tabel Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dari Akhir RPJMD tahun 2019 tercapai 98.35% ada 121 kasus yang ditangani, sedangkan untuk tahun 2020 untuk indicator ini terjadi peningkatan dari kasus yang

ditangani yaitu 96,95% dari 131 kasus yang ditangani dengan 31,30% (41 Kasus) kekerasan orang dewasa atau perempuan dan 65,65% dengan 90 kasus kekerasan anak serta 3,05% atau 4 kasus masih belum ada putusan dari pengadilan.

- Dilihat dari tahun ini ke tahun lalu ada peningkatan kasus kekerasan orang dewasa atau perempuan sebesar 46,43% atau 41 kasus pada tahun ini sedang pada tahun lalu hanya 28 kasus. Untuk kasus pada anak terjadi penurunan 3 kasus dari tahun lalu atau 3,33% dengan kasus yang ditangani sebanyak 90 kasus.

Salah satu kegiatan dalam rangka Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak



Salah Satu kegiatan dalam rangka Penguatan Kabupaten Layak Anak



➤ **Dari ke ketiga indikator diatas ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2020 ini diantaranya :**

- Belum Optimal OPD terkait dalam menganalisis Anggaran yang Responsif Gender, serta tentang Kabupaten Layak Anak
- Kurangnya tenaga ahli yang telah terlatih (bersertifikat), sebagai Narasumber untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak.
- Minimnya dana yang tersedia, sehingga masih ada beberapa kecamatan dan desa yang belum diberikan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak.
- Perlu dibentuk satgas di masing-masing kecamatan dalam hal penanganan kekerasan anak dan perempuan
- Masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Tidak tersedianya tempat Rehabilitasi Sosial Anak Korban Narkoba
- Tidak tersedianya ruangan khusus pemeriksaan korban dirumah sakit
- Sumber Daya Manusia : Masih adanya pemahaman bahwa Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah tanggung jawab sektoral dan belum menjadi perspektif bagi satuan kerja yang lain, Dan masih banyak SDM aparatur yang belum memahami penggunaan alat analisis gender dalam memecahkan isu dan permasalahan Pembangunan Gender.
- Kebijakan : Komitmen Pemangku kebijakan masih kurang, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dianggap bukan tugas utama Perangkat Daerah (PD).
- Belum semua OPD memiliki data pilah gender sebagai landasan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- Rendahnya angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
- Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara Maksimal
- Kurangnya Perempuan sebagai pelaku ekonomi

➤ **Rencana yang akan dilakukan tahun depan :**

- Meningkatkan kinerja SDM dalam proses penanganan dan pendampingan korban anak maupun pelaku anak.
- Meningkatkan kinerja SDM dalam proses penanganan dan pendampingan korban anak maupun pelaku anak.
- Memperkuat koordinasi lintas OPD terutama yang termasuk dalam tim koordinasi penanganan masalah sosial perempuan dan anak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatkan pelayanan pasca trauma terhadap korban dan keluarga.
- Penguatan lembaga P2TP2A telah dilaksanakan sesuai dengan UU no 11/2012 tentang sistem peradilan anak sehingga dari 52 kasus anak tersebut diatas telah tuntas dalam penanganan
- Upaya penurunan angka kekerasan melalui sosialisasi yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

- Bertambahnya Pembentukan Aktivistis-Perindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bangun (Desa Kedang Murung) dan Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi).
- Mengikutsertakan staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan (peningkatan SDM) untuk menjadi Fasilitator/Narasumber
- Membuat rencana program dan kegiatan berdasarkan dengan angka kekerasan perempuan dan anak.
- Adanya Koordinasi dan Sinergi Program Tingkat Kementrian dan dengan OPD Kab/Kota
- Pembangunan Gender menjadi prioritas pembangunan di daerah
- Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Ketersediaan Sumber Daya : SDM dan Anggaran
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dilingkup Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh Perangkat Daerah yang terkait.
- Penguatan Kelembagan: Pokja, Tim Tekhnis, Driver (Bappeda, DP3A, BPKAD , Inspektorat), Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, dan Organisasi Perempuan
- Implementasi melalui Program dan Kegiatan yang ada dalam dokumen DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi Perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha

1. Keberhasilan yang telah dicapai dalam tahun 2020

- Menerima Penghargaan Keberhasilan Pembangunan Peringkat Ke Pertama Kategori Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten/ Kota

C. Realisasi Keuangan

Pada Tahun 2020 Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 5.494.776.456.337,06 dimana dana tersebut di alokasi untuk menunjang Belanja serta Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. **10.661.668.348,10** di lihat dari prosentase dana yang dialokasikan adalah sebesar 0,19% dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Belanja OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kutai Kartanegara pada periode Tahun 2020 sebesar Rp. **9.952.220.643,00** atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp. **10.661.668.348,10** terdapat penurunan realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang sebesar Rp. **10.802.035.161,8** atau **93,73%**.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)	Sisa Anggaran
BELANJA				
- Belanja Pegawai	6.148.132.272,10	5.906.042.761,00	55,40	242.089.511,10
- Belanja Barang dan Jasa	4.387.317.876,00	3.921.581.282,00	36,78	465.736.594,00
- Belanja Modal	126.218.200,00	124.596.600,00	1,17	1.621.600,00
J U M L A H	10.661.668.348,10	9.952.220.643,00	93,35	709.447.705,10

Dari hasil anggaran tersebut di atas, dapat di lihat penjelasan dari sasaran strategis indikator kinerja satuan target realisasi dan persentase capaian serta program dan kegiatan dan anggaran realisasi dan persentase capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Persentase ARG dalam APBD CAPAIAN TAHUN 2020

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak							
Persentase ARG dalam APBD							
Sat	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu
Persen	16,99	15,90	93,58	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.171.918.100	1.109.386.892	70,11
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	93.600.000	87.609.400	5,54
				Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	316.742.978	310.891.600	19,65
					1.582.261.078	1.507.887.892	95,30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Capaian Serapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	93,58	95,30	98,20

Dilihat dari segi efisiensi penggunaan Sumberdaya dengan sasaran strategis **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak** yang indikatornya **Persentase ARG dalam APBD** dapat dilihat dengan matrik diatas.

Pada tahun 2020 pagu tersedia sesudah perubahan sebesar Rp. **1.582.261.078** dengan Realisasi anggaran mencapai Rp. **1.507.887.892** kalau dipersentasekan 95,30%. Sementara Pada Tahun 2019 pagu tersedia Rp. **1.643.181.200** dengan Realisasi anggaran mencapai Rp. **1.579.164.009,-** kalau dipersentasekan 93,91%. sehingga pada tahun 2020 ini terdapat 3,85% penurunan anggaran terhadap indikator ini.

2. Kabupaten Layak Anak (KLA) Capaian Tahun 2020

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak							
Kabupaten Layak Anak (KLA)							
Sat	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu
Angka	710	710	100	Program Pemenuhan Hak-Hak Anak	819.000.000	652.414.899	79,66
					819.000.000	652.414.899	79,66

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	100	79,66	125,53

Dilihat dari segi efisiensi penggunaan Sumberdaya dengan sasaran strategis **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak** dengan Indikatornya **Kabupaten Layak Anak (KLA)** dilihat dengan matrik diatas.

Pada tahun 2020 pagu tersedia sebesar Rp. **819.000.000** dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **652.414.899** kalau dipersentasekan **79,66%**. Sementara Pada 2019 pagu tersedia sebesar Rp. **557.000.000** dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **502.503.400** kalau dipersentasekan **90,22%**. sehingga pada tahun 2020 ini terdapat 147,04% peningkatan anggaran terhadap indikator ini.

3. Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Capaian Tahun 2020

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak							
Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak							
Sat	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu
Kasus	130	121	96,95	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	772.310.100	759.954.093	98,40
					772.310.100	759.954.093	98,40

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak	Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	96,95	98,40	98,52

Dilihat dari segi efisiensi penggunaan sumberdaya dengan sasaran strategis **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan dan Penguatan Perlindungan Anak** yang indikatornya **Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak** dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut ;

Pada tahun 2020 pagu tersedia sesudah potongan sebesar Rp **772.310.100**dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **759.954.093** kalau dipersentasekan **98,40%**, sementara Pada tahun 2019 pagu tersedia sesudah potongan sebesar Rp **1.060.000.000** dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **934.176.407** kalau dipersentasekan **88,13%**, sehingga pada tahun 2020 ini terdapat 37,25%Penurunan anggaran terhadap indikator ini

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara periodic (berdasarkan tahun anggaran).

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu peran bidang dalam menyampaikan data dan analisis masih belum maksimal. Adapun saran yang dapat disampaikan diharapkan dalam penyusunan LKjIP kedepannya agar penyampaian analisis data bisa lebih mendalam, sehingga dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha dalam memenuhi kewajiban dalam menyusun LKjIP ini di Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.